

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP EFEKTIVITAS  
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA**  
(Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**ARIYANSYAH**

**NPM. 1621020217**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP EFEKTIVITAS  
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA**

(Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**ARIYANSYAH**

**NPM. 1621020217**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Desa Talang Batu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan Desa Talang Batu ini merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, fungsi pengayom menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, fungsi pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)”**. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintah desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan populasi dan sampel, Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintah desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Talang Batu. Berdasarkan pada firman Allah Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 bahwa kewajiban setiap muslim ialah mendengar dan taat kepada imamnya, baik ia senang maupun benci, selama tidak disuruh berbuat dosa. Tetapi jika ia disuruh berbuat dosa, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa hendaknya sebagai organisasi perwakilan masyarakat desa supaya lebih menjalankan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan serta selalu memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan dan kepuasan masyarakat karena Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat didaerahnya. Kepada Pemerintah Desa hendaknya lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariyansyah  
NPM : 1621020217  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA** (Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Januari 2021  
Penulis,



Ariyansyah  
1621020217





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN *FIQH SIYĀSĀH* TERHADAP  
EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA** (Studi  
di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur  
Kabupaten Mesuji)

Nama : Ariansyah  
NPM : 1621020217  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.**  
**NIDN. 2005019401**

**Ketua Jurusan,**

**Frenki, M. Si**

**NIP. 198003122009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)”** disusun oleh, **Ariyansyah, NPM : 1621020217** Program Studi **Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar'iyah*)**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Drs. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 19621022199303100**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

**(QS. Al-Anfaal (8) : 27)**





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Robbil `Alamin.* Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafaatnya. Kupersembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Alm. Abdullah Bin Bahusin, Ibundaku Hidayanti Nurva, dan Emakku Berti Cik Arip atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kakak-kakakku Kemala Suri dan Dewi Susanti serta adik-adikku Andi Wijaya, Farina dan juga seluruh keluarga besar BAHUSIN yang selalu mensupport dan menemani proses dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Teman canda, sahabat seorang wanita yang kuat, mandiri, pekerja keras, tapi sedikit egois. Selama ini telah menemaniku memberi semangat saat sulit maupun senang sehingga memotivasiku untuk terus bisa belajar menjadi yang lebih baik lagi yaitu Anggie Eka Puspitasari, S.S.
4. Tak lupa pula skripsi ini penulis dedikasikan untuk calon istri dan calon anak yang inshaallah bisa menjadi panutan yang baik. Amin Ya Robbal Alamin.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Ariyansyah seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 1996 yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Ayahanda Alm. Abdullah Bin Bahusin dan Ibundaku Hidayanti Nurva.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Satria Bandar Lampung, lulus pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 23 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Perintis 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'īyyah*) Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dan lulus pada 12 Januari 2021.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 Januari 2021  
Yang Membuat,

Ariyansyah  
1621020217

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)”**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi *Siyāsah Syar’iyyah*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan *Siyāsah Syar’iyyah* Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Penguji I di Munaqasah yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya ilmiah ini.
6. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan juga Penguji II di Munaqasah yang telah meluangkan waktu dalam membimbing sekaligus menguji karya ilmiah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak M. Yasin Al Arif, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan juga Penguji III di Munaqasyah yang telah meluangkan waktu dalam membimbing sekaligus menguji karya ilmiah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
9. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung yang telah memberikan izin peneliti mencari refrensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang telah memberikan izin peneliti mendapatkan refrensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.



11. Kepada Kepala Desa Talang Batu Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, yang telah memberikan izin peneliti mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Badan Permusyawaratan Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang telah membantu peneliti mendapatkan data wawancara dan dokumentasi untuk kepentingan skripsi.
13. Ayahanda Alm. Abdullah Bin Bahusin dan Bundaku Hidayanti Nurva yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan formil maupun moril, serta kasih sayangnya. Pokoknya Kyay sayang banget sama kalian.
14. Adik-adiku Andi Wijaya dan Farina tercinta yang selalu memberikan dukungan dan senyum semangat kepadaku.
15. Sahabat yang membantuku dalam perskripsian duniawi (M Ilham Akbar, M Dwi Mardiyanto, Fikri Romadhon, Roby Fernando, Bagus Ramadi, Tomy Yahya, Agung Riski Putra, Intan Novita Sadewa, S.H., Ayu Endar Kinasih, S.H., Pandani Elisa, S.H., Mira Resti Ayu, S.H.,).
16. Ceka-Ceka Squad yang selalu main kerumah candaan gajelas (Nova Indah Nur Budi Riani, Ayu Syahira Ganda, Misdasari, S.H.,).
17. Sahabat Rumah Susun Mahasiswa (Julio Syahrezi, M Rausyan Fikri, M Irvan Rapido) yang sempat tinggal bersama lalu kemudian pergi entah kemana.
18. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia angkatan 16 (Tiara Santika, Widya Indriyani, Yasir A Rapat, Wahyu Hidayat, Satrio Pangaribowo, Ahmad Bustomi, Eka Shaputra Jaya, S.H.,)

19. Senior-seniorku (Nicho Hadi Wijaya, S.H., Billy Syahputra, S.H., Lukmansyah, S.H., Juwita Djahri, S.H., Yan Barusal, Yogi SPJ, S.H.) yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat dalam berorganisasi.
20. Kelompok Studi Kader (KLASIKA) Bang Bemol, Bang Bebes. Khususnya Bang Chepry Chaeruman Hutabarat sebagai Founder Klasika yang sudah mau berbagi ilmu serta pengalaman nya dalam kaderisasi maupun kelas desain nya.
21. Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 135 KKN Revolusi Mental Bunda Kanada Komariyah, M.Pd.I. Tak lupa pula teman-teman Kelompok 135 KKN Revolusi Mental ku.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 12 Januari 2020  
Penulis,

Ariyansyah  
1621020217

## DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                       | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                  | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                             | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                            | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                        | <b>xvi</b>  |
| <br><b>BAB I            PENDAHULUAN</b>             |             |
| A. Penegasan Judul .....                            | 1           |
| B. Alasan Memilih Judul .....                       | 3           |
| C. Latar Belakang .....                             | 3           |
| D. Fokus Penelitian .....                           | 13          |
| E. Rumusan Masalah .....                            | 13          |
| F. Tujuan Penelitian .....                          | 13          |
| G. Signifikansi Penelitian .....                    | 14          |
| H. Metode Penelitian.....                           | 14          |
| <br><b>BAB II            KAJIAN TEORI</b>           |             |
| A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....                        | 22          |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....             | 22          |
| 2. Kedudukan <i>Fiqh Siyāsah</i> .....              | 25          |
| 3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....          | 27          |
| 4. Kriteria <i>Fiqh Siyāsah</i> .....               | 31          |
| 5. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i> .....        | 34          |
| B. <i>Siyāsah Dusturiyyah</i> .....                 | 34          |
| 1. Pengertian <i>Siyāsah Dusturiyyah</i> .....      | 34          |
| 2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dusturiyyah</i> .....   | 37          |
| C. <i>Ahl al-Hall Wal'Aqd</i> .....                 | 46          |
| D. Pemerintah Desa.....                             | 47          |
| 1. Pengertian Pemerintah Desa .....                 | 47          |
| 2. Peran Pemerintah Desa .....                      | 49          |
| E. Badan Permusyawaratan Desa .....                 | 52          |
| 1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....      | 52          |
| 2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa..... | 53          |
| F. Tinjauan Pustaka .....                           | 57          |



|                          |  |    |
|--------------------------|--|----|
| <b>BAB III</b>           | <b>DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>  |    |
| A.                       | Gambaran Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji .....                  | 62 |
| 1.                       | Keadaan Geografis Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.....          | 62 |
| 2.                       | Visi dan Misi .....  | 62 |
| 3.                       | Keadaan Penduduk .....   | 63 |
| B.                       | Pemerintah Desa Talang Batu .....  | 65 |
| C.                       | Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa di Desa Talang Batu .....                       | 67 |
| D.                       | Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan Desa Talang Batu .....                             | 72 |
| <b>BAB IV</b>            | <b>ANALISIS PENELITIAN</b>   |    |
| A.                       | Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Talang Batu .....                          | 77 |
| B.                       | Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Talang Batu..... | 83 |
| <b>BAB V</b>             | <b>PENUTUP</b>   |    |
| A.                       | Kesimpulan .....   | 93 |
| B.                       | Rekomendasi .....  | 94 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>    |  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> |  |    |

## DAFTAR TABEL

| Tabel   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Jumlah Penduduk .....                      | 63      |
| 2. Penduduk Berdasarkan Agama .....           | 63      |
| 3. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....       | 64      |
| 4. Perangkat Desa.....                        | 66      |
| 5. Perangkat Badan Permusyawaratan Desa ..... | 67      |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Blanko Konsultasi Skripsi

**Lampiran 2** Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

**Lampiran 3** Surat Rekomendasi Izin Penelitian/Survey Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kabupaten Mesuji

**Lampiran 4** Surat Izin Riset Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur  
Kabupaten Mesuji

**Lampiran 5** Surat Keterangan Wawancara

**Lampiran 6** Dokumentasi

**Lampiran 7** ACC Cetak Skripsi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA** (Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)”.

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut :

*Fiqh Siyāsah* Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Efektivitas, (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat), yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya) manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, dan tindakan), mulai berlakunya (tentang Undang-undang dan peraturan) atau keadaan yang berpengaruh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Grou, 2014), h. 4.

<sup>2</sup> Andre Martin dan Bhaskarra, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*, (Surabaya: Karina Surabaya, 2002), h. 158.

Badan Permusyawaratan Desa biasa disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>3</sup>

Pelaksanaan berarti juga melaksanakan yaitu melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).<sup>4</sup>

Pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni

Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).<sup>5</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 664.

<sup>5</sup> CST Kansilel.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 87.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai pengaruh adanya Badan Permusyawaratan Desa terhadap rancangan kegiatan di dalam sistem Pemerintahan Desa.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan yang membuat penulis tertarik dalam memilih judul tersebut adalah :

1. Alasan objektif, alasan objektifnya adalah penulis ingin mengetahui bagaimana peran dan pengaruh adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan di desa yang akan penulis teliti.
2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Jurusan *Siyāsah* Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

## **C. Latar Belakang**

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.<sup>7</sup> Pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi*. (PT. Mandar Maju, 2008). h. 14.



Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.<sup>8</sup>

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat, salah satu elemen tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di desa sebagai penampung aspirasi masyarakat mempunyai peran yang cukup strategis dalam pelaksanaan pembangunan desa.<sup>9</sup> Masyarakat sebagai subjek pembangunan tentunya harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan tersebut akan dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

Masyarakat dapat berperan aktif dan memberikan ide-ide dalam merencanakan pembangunan desa. Ide-ide pembangunan yang didasarkan pada kepentingan masyarakat akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa dan akan dimufakatkan bersama dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) sehingga dapat direncanakan dengan baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,

---

<sup>8</sup> Susanto. *Sistem Informasi*. Bina Cipta. 2005. h. 156

<sup>9</sup> Dwi Jatmoko, *Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa*. (Surakarta, 2006), h. 4.

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>10</sup>

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>12</sup>

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk

---

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 74.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 76.

<sup>12</sup> M. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,. Cetakan Pertama (Malang: Setara Press 2014), h. 76.

mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh.<sup>13</sup> Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam tatanan pemerintahan yang terendah Badan Permusyawaratan Desa merupakan parlemen atau dewan syuranya pemerintahan desa.<sup>14</sup> Kajian *fiqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.<sup>15</sup>

*Al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyāsah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah

---

<sup>13</sup> Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h 96.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 100.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1, h. 142

kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍa'iyah*).<sup>16</sup>

Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.<sup>17</sup>

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 145.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 16.

lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.<sup>18</sup>

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.<sup>19</sup>

Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 778.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 464.



menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>20</sup>

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.<sup>21</sup> Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 469.

<sup>21</sup> Syahrial syarbaini rusdiyanta, *Dasar-dasar sosiologi*. edisi pertama (yogyakarta: graha ilmu 2009), h. 46.

nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.<sup>22</sup> Dengan demikian pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>23</sup>

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga

---

<sup>22</sup> Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (malang: setara press 2014), h. 76.

<sup>23</sup> Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (malang: setara press 2015), h. 215.

dengan masa jabatan BPD, mereka hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Dari penjelasan di atas BPD hanya mempunyai 2 (dua) fungsi saja sebagaimana yang dijelaskan pasal 209. Berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Demikian juga Badan Permusyawaratan Desa bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa.<sup>24</sup> Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 101.

Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan Badan Permusyawaratan Desa, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Desa Talang Batu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan Desa Talang Batu ini merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, fungsi pengayom menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, fungsi pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga perlu memberikan fungsi pengawasan yang kuat kepada kepala Desa dalam menjalankan roda

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 105.

pemerintahan di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan penyimpangan terhadap APBDes.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pendahuluan fokus pada tujuan dari penelitian yang akan diselesaikan. Fokus penelitian waji dilakukan guna memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian penulis adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji).

#### **E. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintah desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintah desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Pemerintah Desa.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di bidang *Siyāsah* dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

###### **a. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.<sup>27</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsisecara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.

<sup>28</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28.

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>29</sup>

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>30</sup> Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara kepada pihak - pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, situs - situs internet, dan Undang Undang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa serta, aparatur Pemerintah Desa serta Tokoh masyarakat Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 128.

## b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai wakil *representative* dari keseluruhan untuk diteliti. Yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjetif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada besarnya populasi, semakin besar populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar.<sup>31</sup> Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>32</sup>

Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 8 orang yaitu 5 orang anggota BPD yang terdiri dari 1 orang Ketua BPD, 1 orang Wakil Ketua BPD, 1 orang Sekretaris BPD, dan 2 orang anggota BPD yang dianggap mewakili populasinya, serta 1 orang Kepala Desa dan 2 orang tokoh masyarakat.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Observasi

Observasi bisa dengan pengamatan berperan serta dan pengamatan tanpa peran serta. Dengan pengamatan akan diperoleh data yang benar-

<sup>31</sup> Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). h. 187.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 244.

benar asli yang berasal dari spontanitas tindakan dan kewajaran dari sikap aktor. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).<sup>33</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

---

<sup>33</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.



a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>34</sup>

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>35</sup>

Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

<sup>36</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

#### d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying*, *concluding*.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.<sup>38</sup>

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan

---

<sup>37</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

<sup>38</sup> Saifullah, *Panduan Metodologi*, h. 245.

metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 245.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyāsah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.<sup>1</sup>

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>2</sup> *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 11.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3.

<sup>3</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Selanjutnya Ibn Manzhur mendefenisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>4</sup> Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> *Siyāsah* yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 4.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>6</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 42.



dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>7</sup>

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keIslaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijtihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 76.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>8</sup>

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.<sup>9</sup>

## 2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 90.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).<sup>10</sup>

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.<sup>12</sup>

*Fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>11</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 22.

Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau *fiqh siyāsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*.<sup>13</sup> Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>14</sup>

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>15</sup>

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 23.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 12.

bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>16</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut :

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâlîyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>17</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup :

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 13.



- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha`iyyah*).
- d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyāsah `Idariyyah*).<sup>18</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>19</sup>

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiyyah* yang mencangkup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum. *siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 14.

sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>20</sup>

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) adalah *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara. Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyāsah*, maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan Islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.<sup>22</sup>

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 14.

<sup>21</sup> Juhaya S Praja. 2010, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 13.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 25.

satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar’iyyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.<sup>23</sup> Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar’iyyah*.

#### 4. Kriteria *Fiqh Siyāsah*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari’at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad’iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad’iyyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar’iyyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

*”Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah”.*<sup>24</sup>

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar’iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh

<sup>23</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 43.

<sup>24</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini* .Jakarta: Kencana, 2004, h. 45.

penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>25</sup>

(QS. An-Nisa ayat 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus

memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), h 87

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64.

- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan

## 5. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.

## B. *Siyāsah Dusturiyyah*

### 1. Pengertian *Siyāsah Dusturiyyah*

*Siyāsah dusturiyyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain

---

<sup>28</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 308.



konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>29</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>30</sup>

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara.”<sup>31</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

<sup>30</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 44.

dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.<sup>32</sup>

Dalam *fiqh siyāsah* , konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.<sup>33</sup> Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.<sup>34</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 45.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 175.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 177.

diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>35</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dusturiyyah*

*Fiqh Siyāsah Dusturiyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *fiqh siyāsah dusturiyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena

<sup>35</sup> Ibid, h. 178.

<sup>36</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003),

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>37</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dusturiyyah* dapat dibagi kepada:<sup>38</sup>

1. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 48.

kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.<sup>39</sup>

*Interpretasi* adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>40</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>41</sup>

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk

---

<sup>39</sup> Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996, h. 12.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 15.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 17.

sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulṭah al-qadha'iyah*).<sup>42</sup>

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>43</sup>

### 1. *Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah*

*Al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyāsah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 157.



kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍa'iyah*).<sup>44</sup>

Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.<sup>45</sup>

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua

---

<sup>44</sup> Qardawi, Yusuf.2008. *Min Fiqhid Daulah Fil Islam. Terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. 3; Jakarta: al-Kausar, h. 3.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 6.

syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas.<sup>46</sup>

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

## 2. *Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, *imarah/'āmir,* dan *wizarah/wāzīr*. Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*.<sup>47</sup>

Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 10.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 17.

meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>48</sup>

Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu *Sunni* dan *Syi'ah*. Kelompok *Sunni* percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang *Syi'ah* percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok *Sunni*, tetapi yang pertama bagi *Syi'ah*.<sup>49</sup>

*Syi'ah* sekarang ini, khususnya aliran *isnā asy'ariyyah* banyak berkembang di Iran, Iraq dan Lebanon. Setelah Imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan *Syi'ah* tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah Wilayat Faqih yang diderivasi oleh Imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi 1979 di Iran. *Syi'ah* 12 berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam mereka yang kedua belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sarjana, *mujtahid*, dan *Ayatullah* sehingga sang imam muncul kembali. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi

---

<sup>48</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 117.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 118.

Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Allmamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih.<sup>50</sup>

### 3. *Al-Sulṭah al-Qaḍā'īyyah*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep *Fiqh siyāsah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut *Sulṭah Qaḍā'īyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.<sup>51</sup>

Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga '*al-Qaḍā'*' tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qaḍā'*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah *Qaḍā'*, Wilayah *Mazālim*, dan Wilayah *Hisbah*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 119.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 130.

Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulṭah al-tasyri' iyyah* (kekuasaan legislatif), *Sulṭah al-ṭanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulṭah al-Qaḍā' iyyah* (kekuasaan yudikatif).<sup>52</sup>

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan al-Qur'an dan al-Hadis Nabi Muhammad saw. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan eksistensi Hadis merupakan penjelasan tentang al-Qur'an.<sup>53</sup>

Adapun tugas *al-Sulṭah al-Qaḍā' iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qaḍā'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 138.

<sup>53</sup> Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996), h. 57.

kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>54</sup>

### C. *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*

Secara harfiah *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al 'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.<sup>55</sup>

Anggota *ahl al-hall wa al 'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan *ahl al-ikhyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*.<sup>56</sup>

Sementara al- Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl alijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis *syura*

---

<sup>54</sup> Ridwan HR., *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), h. 273.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 158.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 158.



yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.<sup>57</sup>

Bila al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundangundangan Islam tidak menyebutkan *ahl al-hall wa al'aqd* atau Dewan perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam *turast fiqh* kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-Quran ada dalam mereka yang disebut dengan *ulil amri*.<sup>58</sup>

## **D. Pemerintah Desa**

### **1. Pengertian Pemerintah Desa**

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dan merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian desa menjadi sumber utama dan pertama berbagai macam data serta bermacam-macam keterangan yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah maupun nasional, desa memberikan pelayanan, bantuan dan melaksanakan berbagai urusan pada masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 158.

<sup>58</sup> Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h 82.

<sup>59</sup> Beratha, N. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*.(Jakarta :1992), h 3

Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah tangga di desanya, memenuhi rakyat banyak di desanya serta mengelola potensi-potensi lokal yang ada sehingga dapat digunakan meningkatkan kapasitas dan manfaat dalam pembanguan masyarakat. Stuktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan di Desa akan mempermudah kinerja dalam melaksanakan tugasnya maka pelaksanaan suatu pemerintahan desa diperlukan adanya kinerja yang jelas dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas.<sup>60</sup>

Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.<sup>61</sup>

Pemerintah Desa merujuk pada perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, yang merupakan bagian integral dari aparatur Pemerintahan Indonesia.<sup>62</sup> Adapun Kepala Desa merupakan penanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa merupakan penyelenggara utama dibidang pemerintahan, pembangunan,

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>61</sup> *Ibid*, h .5.

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 7.

kemasyarakatan dan unsur pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di Desa.<sup>63</sup>

## 2. Peran Pemerintah Desa

Peran Pemerintah Desa adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama aparat Pemerintahan Desa dalam menjalankan program kerja yang telah diatur dan dibuat berdasarkan kepentingan Pemerintah Desa dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik. Pemerintahan Desa membawahi masyarakat yang ada di Desa serta memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan serta pembangunan Desa.<sup>64</sup>

Salah satu peran yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa adalah penyusunan Peraturan Desa. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>65</sup> Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa.<sup>66</sup>

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaanya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peran masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>65</sup> Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang. Setara, h. 3.

<sup>66</sup> Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta. Ghalia Indonesia, h. 12.

mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintahan Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.<sup>67</sup>

Keberadaan Pemerintahan Desa yang telah dikenal lama dalam tatanan Pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara itu dalam sistem Pemerintahan Indonesia juga dikenal Pemerintahan Desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata Pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekertaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.<sup>69</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan

---

<sup>67</sup> Pipin Syarifin dan Dadah Junaedah. 2005. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung. Pustaka Bani Quraisy, h. 4.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Dalam melaksanakan tugasnya.<sup>70</sup>

Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat Desa. Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas untuk:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>71</sup>

Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

### **1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.<sup>73</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>74</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”<sup>75</sup> Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>74</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.<sup>76</sup>

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.<sup>77</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislative desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan

---

<sup>76</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>77</sup> Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. 2016.h. 1.

mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>78</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>79</sup>

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

- a. Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi :<sup>80</sup>
  1. Menggali aspirasi masyarakat.
  2. Menampung aspirasi masyarakat.
  3. Mengelola aspirasi masyarakat.
  4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
  5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa.

7. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi).

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama pemerintahan Desa.

2. Membuat naskah akademik Peraturan Desa.<sup>81</sup>

c. Fungsi Pengawasan Tugas dan fungsi pengawasan, meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa,.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa.

3. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya.<sup>82</sup>

Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

d. Fungsi Penganggaran Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa .

dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.<sup>83</sup>

- e. Fungsi Pengayom Adat Istiadat Desa Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing desa. Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.<sup>84</sup>

Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Adapun bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh

---

<sup>83</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).<sup>85</sup>

Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa.<sup>86</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1. Penelitian Nabila Puspita, 2018, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung yang berjudul “Tinjauan *Fiqh siyāsah* Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan).”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Kepala Desa dan BPD di Desa Haduyang sudah melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan

---

<sup>85</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>86</sup> Saiful, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2*, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Palu. 2014, h. 1.

pembangunan Desa dan Bagaimana pandangan *Fiqh siyāsah* tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan untuk mengetahui pandangan *Fiqh siyāsah* tentang fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. Tinjauan *Fiqh siyāsah* terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa

2. Penelitian Yusep Pebriansah, 2019, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung yang berjudul “Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi pada BPD di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).”



Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Desa Bahway, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa menurut undang-undang ? 2) Bagaimana tinjauan fiqh Siyash terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan fiqh siyash belum dapat direalisasikan secara utuh oleh BPD Bahway dan tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dalam mensejahterakan Masyarakat Desa dirasa belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut : 1) Tidak ada partisipasi dari masyarakat Bahway untuk melaksanakan gotong-royong. 2) Dana yang ada di BPD tidak disalurkan untuk membangun Desa. 3) Hampir tidak pernah atau jarang sekali di adakan musyawarah. 4) Aspirasi perbaikan akses jalan di Desa Bahway yang sampai saat ini belum juga di realisasikan oleh BPD. Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa ini berkenaan dengan beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang belum dilaksanakan secara maksimal.

3. Penelitian Nur Halima, 2019, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan).”

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan pembangunan Desa Airupik terhadap perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan di Desa airupik, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Airupik. Dan kegunaan dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi kepada masyarakat.

Hasil penelitian di simpulkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Airupik, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan Desa belum sepenuhnya terlaksana karena disebabkan oleh Usia Undang-Undang yang relaif baru dan faktor anggaran Pembangunan Desa yang terbatas. Pandangan hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam yakni seorang pemimpin harus berprinsip adil dan amanah.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penulis fokus pada efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintah desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al Quran Kariim

#### Buku

- Achmadi, Abu, Narkubo, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- CST Kansilet.al., *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Juhaya S Praja. 2010, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia. 2013.
- Kansil, CST et.al. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES. 1996.
- Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Martin, Andre, Bhaskarra. *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*. Surabaya: Karina Surabaya. 2002.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*. Bandung: Angkasa Bandung, 2003.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Saifulllah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.

Sajogyo, Pudjiwat (ed). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1996.

Saudjana, Nana, Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo. 2002.

Sugiyono. *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta. 2005.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Yusdani, Fiqh Politik *Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.

### **Jurnal**

Saiful, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Palu. 2014.

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa